

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dalam penelitian ini digunakan untuk membantu menegaskan atas pentingnya penerapan *green accounting* dari berbagai sumber. Selain itu juga untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari penelitian dan faktor-faktor penting lainnya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2021) tentang “Analisis Penerapan “*Green Accounting*” PT Perkebunan Nusantara Xiv (Persero) Pabrik Gula Takalar Kabupaten Takalar”. menyatakan bahwa penerapan *green accounting* telah dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara, mengingat adanya kenaikan jumlah biaya yang dikeluarkan semakin meningkat untuk proses pengolahan limbah.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Kurniawan (2022) tentang “Penerapan Akuntansi Lingkungan Badan Usaha Milik Desa Untuk Mewujudkan *Green Accounting* Badan Usaha Milik Desa Adijaya Lampung Tengah”. menyatakan bahwa penerapan akuntansi lingkungan telah dilakukan oleh BUMDES. Namun penerapan tersebut dimasukan ke dalam laporan RPJMD dan masih menggunakan pencatatan sederhana sekaligus belum memahami istilah akuntansi lingkungan.

Penelitian Nurafika (2019) berjudul “Analisis Penerapan *Green Accounting* Di PTPN III Kebun Rambutan Dan Kebun Gunung Par”. Menyatakan bahwa *green accounting* telah diterapkan dengan cara melaporkan biaya proses pengelolaan produk yang berimbas kepada kewajiban pihak pengelola untuk pengelolaan limbah, sehingga hal tersebut diakui dalam pos biaya umum kebun pada PTPN III.

Kemudian penelitian dari Millati (2016) dengan tentang “Akuntansi Lingkungan Sebagai Strategi Pengelolaan Lingkungan Daerah Wisata Gunung Ijen Kabupaten Banyuwangi”. Menyatakan belum adanya penerapan akuntansi lingkungan, hal ini dikarenakan pihak pengelola belum memahami tentang akuntansi lingkungan. dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Dikarenakan pihak pengelola memutuskan memanfaatkan daerah pegunungan untuk menjadi wisata. Sekaligus persamaan atas pengetahuan seperti pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang perlu dipahami untuk laporan keuangan lingkungan.

Dari penelitian didapat kebaruan tentang persamaan dan perbedaan atas penelitian terdahulu dengan objek penelitian yang akan dilakukan. Dimana persamaan dan perbedaan tersebut mengarah pada perlunya perhitungan dengan seksama atas pemahaman *green accounting* sesuai dengan kebutuhan beberapa pihak, entah itu dalam lingkup perusahaan, desa, wisata, ataupun sekedar penentuan suatu proses pengukuran terhadap investor atau pihak eternal lain, namun jika sudah berhubungan dengan pertanggungjawaban mengenai alam, tentu

harus diperhatikan karena hal tersebut mempengaruhi siklus lingkungan di sekitar masyarakat yang memanfaatkannya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Legitimasi

Tahun 2019 Guthrie dan Parker menggagas teori legitimasi perusahaan sangat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan berinteraksi dengan lingkungan sosial dan ekologis. Perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial cenderung mendapatkan legitimasi yang lebih kuat dari masyarakat. Kontrak sosial antara bisnis dan masyarakat, di mana bisnis beroperasi dan memanfaatkan sumber daya ekonomi, adalah elemen paling mendasar dari teori legitimasi (Ghozali & Chariri, 2007). Menurut teori ini, perusahaan harus mengkonfirmasi apakah mereka beroperasi dalam nilai-nilai masyarakat dan apakah aktivitas mereka dapat diterima oleh pihak luar. Jika nilai suatu organisasi selaras dengan nilai yang berlaku di masyarakat, maka organisasi tersebut akan bertahan (Lindrianasari, et al., 2018). Selanjutnya, perusahaan harus responsif terhadap perubahan nilai dan norma dalam masyarakat untuk mempertahankan legitimasi. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dapat menyebabkan legitimasi perusahaan dipertanyakan, terutama dalam konteks isu-isu sosial dan lingkungan yang berkembang (Bacchi dan Eveline, 2019)

Teori legitimasi menekankan perusahaan dapat menunjukkan bahwa pelatihan dan operasional mereka menguntungkan masyarakat umum. Laporan tindakan kewajiban sosial dan lingkungan perusahaan seperti yang tertera pada laporan pemeliharaan dapat digunakan oleh perusahaan guna menandakan bahwa mereka

telah melaksanakan kewajiban sesuai standar yang berlaku. Implementasi *green accounting* dan MFCA sebagai upaya mencapai pembangunan berkelanjutan menjadi cara bagi perusahaan untuk mendapat legitimasi dari lingkungan sekitar. Ini adalah kesempatan bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi selain masalah terkait situasi keuangan perusahaan. Selain itu, diharapkan bahwa perusahaan dapat memberikan informasi tentang kondisi sosial dan lingkungan terkait strategi bisnisnya (Marota, 2017).

2.3 Ekowisata

Definisi ekowisata yang diperkenalkan oleh organisasi *The Ecotourism Society* pada tahun 2021, Ekowisata adalah sebagai perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah alami yang melestarikan lingkungan, melindungi keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Sedangkan Hector Ceballos-Lascurain (2022) menyebutkan bahwa Ekowisata adalah bentuk pariwisata yang bertanggung jawab yang berfokus pada perjalanan ke daerah alami dengan tujuan untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Beberapa aspek kunci dalam ekowisata berdasarkan Direktorat Produk Pariwisata Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yaitu:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Ditekankan dalam dokumen tahun 2015, menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk keberlanjutan ekosistem.

2. Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Diatur dalam pedoman tahun 2017, fokus pada keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ekowisata untuk meningkatkan kesejahteraan.
3. Edukasi dan Kesadaran Lingkungan: Ditambahkan dalam kebijakan tahun 2018, menekankan perlunya program edukasi untuk pengunjung dan masyarakat mengenai konservasi.
4. Kemitraan Multi-Stakeholder: Ditekankan dalam rencana strategis tahun 2020, mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengembangan ekowisata.
5. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim: Diintegrasikan dalam kebijakan tahun 2021, menekankan pentingnya strategi adaptasi perubahan iklim dalam pengelolaan destinasi ekowisata.

Ekowisata merupakan pembatasan jumlah wisatawan sesuai dengan daya dukung kawasan. Hal ini dilakukan karena dalam konsep ekowisata pengembangannya tidak bersifat mass tourism, sehingga dengan demikian pengembangan objek wisata perlu penentuan daya dukung agar aktivitas wisata dapat berlangsung secara berkelanjutan (*sustainable*) dan kondisi sumberdaya tetap lestari atau tidak rusak (*collaps*).

2.4 Green Accounting

2.4.1 Pengertian Green Accounting

Green Accounting ialah alat penting untuk mengukur dan melaporkan dampak lingkungan dari operasi bisnis. Ini sejalan dengan model tiga pilar, di

mana perusahaan harus mempertimbangkan tidak hanya profitabilitas tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. (Garrone et al, 2023). Akuntansi hijau yang dikenal juga sebagai akuntansi lingkungan ialah sistem yang mengukur dan melaporkan dampak lingkungan dari operasi perusahaan. Ini mencakup pengukuran sumber daya alam yang digunakan, limbah yang dihasilkan, dan dampak sosial terhadap komunitas, sehingga mendorong tanggung jawab sosial perusahaan. (Hassan dan Shafie, 2022).

Konsep *green accounting* berfokus terhadap efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya selama aktivitas operasional. Hal tersebut secara berkesinambungan dapat menyelaraskan perkembangan dan fungsi lingkungan perusahaan (Loen, 2018). Secara umum, implementasi *green accounting* dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk kelestarian lingkungan, perencanaan jangka panjang, serta efisiensi lingkungan. Oleh sebab itu, pemahaman perusahaan mengenai isu lingkungan sangat berpengaruh terhadap pengenalan *green accounting* itu sendiri. Pemahaman terhadap isu-isu lingkungan menjadi panduan perusahaan dalam membuat kebijakan mengenai keselamatan lingkungan, terutama yang berhubungan dengan aktivitas produksinya. Pengimplementasian *green accounting* yang baik pada perusahaan menandakan rasa peduli perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat serta kualitas dan keamanan hasil produksinya (Abdullah & Hernawati, 2020).

2.4.2 Tujuan dan Karakteristik Green Accounting

Menurut *United States Environment Protection Agency* (US EPA) atau Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, salah satu tujuan terpenting akuntansi lingkungan ialah memberikan informasi terkait biaya lingkungan kepada para pemangku kepentingan, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi cara-cara spesifik bahwa biaya tersebut dapat ditingkatkan atau diturunkan ketika kualitas lingkungan sedang ditingkatkan. Menurut (Abdullah & Hernawati, 2020), implementasi *green accounting* bertujuan guna menciptakan citra yang lebih positif bagi perusahaan. Hal tersebut dapat dicapai dengan memaksimalkan transparansi lingkungan serta memantapkan strategi perusahaan dalam menghadapi masalah lingkungan. Ada tiga karakteristik kualitatif spesifik dari informasi akuntansi hijau yang berguna untuk mengevaluasi seberapa baik para pemakai dalam mengambil keputusan, yakni sebagai berikut (Lako, 2018)

1. Akuntabilitas, mengacu pada data yang mencakup seluruh aspek informasi entitas, terutama mengenai perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungannya serta keuntungan yang mungkin dihasilkan dari peristiwa yang timbul.
2. Terintegrasi dan komprehensif, yakni data akuntansi gabungan dari informasi keuangan dan sosial lingkungan.
3. Transparan, yaitu data akuntansi yang harus diungkapkan secara jelas serta tidak ambigu untuk menghindari kesulitan para pihak dalam mengevaluasi, menyusun, dan menguraikan sudut pandang ekonomi dan non ekonomi.

2.4.3 Alasan Penerapan *Green Accounting*

Mengingat pelaksanaan *green accounting* yang berhubungan dengan biaya membuat keharusan suatu organisasi membedakan suatu biaya dengan beban. Karena terkadang hal tersebut biasanya tercatat sebagai beban pada pihak manajemen yang tidak tau makna beban dan biaya itu sendiri. Mengingat kinerja lingkungan sangat penting untuk diukur agar keberhasilan perusahaan dapat tercapai (Fasua,2011).

Menurut PSAK adanya beban dikarenakan aktivitas perusahaan yang biasa sedangkan biaya adalah jumlah kas yang keluar untuk memperoleh aset saat perolehan.

Walaupun *Green Accounting* belum memiliki peraturan pasti untuk pelaporannya, pedoman yang cukup jelas dan tegas dalam kewajiban menyampaikan informasi terkait dengan pelestarian lingkungan ini terlihat dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.1 (Revisi Tahun 2009) tentang penyajian laporan keuangan, paragraf 14 yang singkatnya laporan tambahan seperti mengenai lingkungan hidup dan lainnya, dilaporkan terpisah dan di luar lingkup standar akuntansi keuangan.

Karena itu untuk penerapan akuntansi lingkungan perlu menggabungkan acuan Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang dimana SAK ETAP mencantumkan penggunaannya untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang mencakup tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan penerbitan laporan keuangan bertujuan untuk umum bagi pengguna

eksternal. Seperti pemilik yang tidak terbit langsung dalam pengelola usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit namun untuk acuan penyajian juga dapat dilihat melalui PSAK No.1 yang telah dijelaskan singkat sebelumnya.

2.5 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan tujuan pembangunan nasional dengan iktikad mampu memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program-program, tentu perlu diperhatikan mengingat indonesia juga ikut serta dalam melaksanakan program-program tersebut. Kemiskinan, kesenjangan, dan perlindungan lingkungan, secara aman dan pantas tentu menjadi hak setiap mahluk. “SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 yang berfokus kepada lima poin yaitu *people, planet, prosperity, peace, dan partnership*” (Fennel & Chris 2020).

SDGs atau biasa juga disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dicetuskan pada tanggal 25 September tahun 2015 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berjumlah 159 negara. dengan tujuan global yang mencakup luas dan adanya ambisi untuk kesejahteraan dunia. Hal ini direvisi dari rencana pembangunan berkelanjutan sebelumnya yang sering disebut *Millennium Development Goals (MDGs)* pada tahun 2000 hingga tahun 2015. Dengan nama program baru ini, sekaligus memiliki tujuan utama baik internasional ataupun nasional hingga pelosok, tentu persamaan atas peraturan Negara Indonesia yang dicetuskan Nomor 166 Tahun 2014 perlu diterapkan. Dimana peraturan tersebut menyatakan kemiskinan merupakan permasalahan

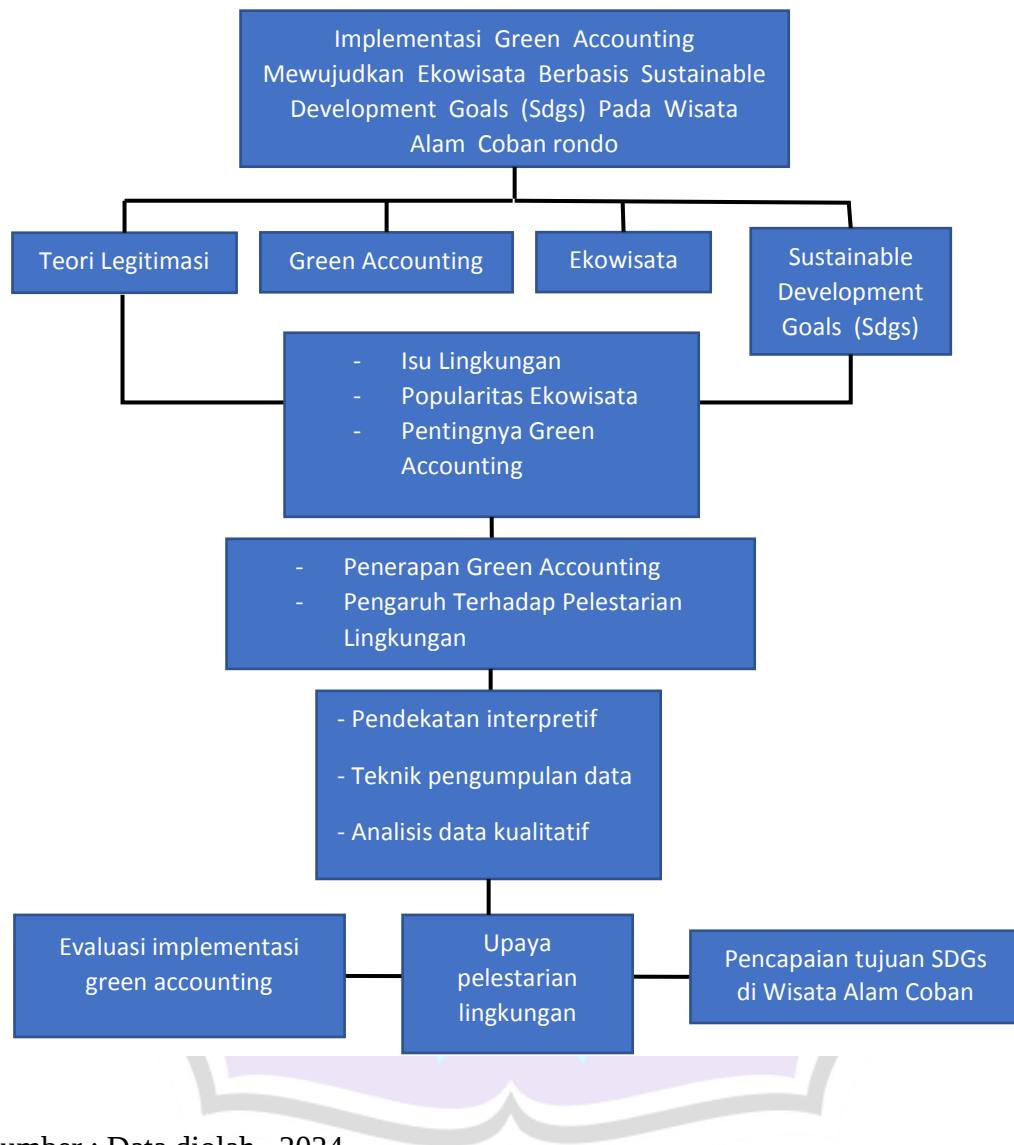
bangsa yang mendesak dan diperlukannya solusi atas penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, hingga mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak (Luthfyah, 2022).

Maka dapat disimpulkan SDGs adalah program global yang dibuat berdasarkan revisi program lama yaitu MDGs dengan tujuan global atas kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan. Dipertegas juga oleh Alfarizi (2021) bahwa SDGs adalah salah satu proses pembentukan lapangan pekerjaan yang layak dan menyangkut kebijakan pembangunan dan mendorong kegiatan produktifitas sekaligus mengurangi angka kemiskinan.



2.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Sumber : Data diolah , 2024

Kerangka pemikiran penelitian ini berfokus pada penerapan *Green Accounting* dalam konteks ekowisata, khususnya di Wisata Alam Coban Rondo. Dalam era di mana isu lingkungan semakin mendesak, penerapan praktik akuntansi yang mempertimbangkan biaya lingkungan menjadi sangat penting

untuk memastikan keberlanjutan industri pariwisata. *Green Accounting* tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran biaya, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pengelola wisata terhadap dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *Sustainable Development Goals (SDGs)*, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi *Green Accounting* dapat memperkuat pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi hubungan antara pengembangan ekowisata dan upaya pelestarian lingkungan. Melalui pendekatan kualitatif yang mengedepankan perspektif interpretatif, penelitian ini akan menggali pandangan dan pengalaman masyarakat lokal serta pengelola wisata dalam menerapkan *Green Accounting*. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya akuntansi lingkungan dalam mendukung keberlanjutan ekosistem serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar destinasi wisata. Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi pengelola dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan lingkungan dan sosial yang dihadapi.